

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Solok dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Diskominfo Kabupaten Solok disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2023, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Diskominfo Kabupaten Solok merupakan perwujudan bentuk akuntabilitas sebagai unit organisasi untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dimandatkan kepada Diskominfo Kabupaten Solok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian Diskominfo yang menggambarkan tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Solok, yaitu ***“Mambangkik Batang Tarandam, menjadikan Kabupaten Solok Terbaik di Sumatera Barat”***, serta diperkuat dengan Misi ke-4 ***“Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Bersih”***. Strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun *outcomes* di masa mendatang.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Diskominfo Kabupaten Solok Tahun 2023 baik tenaga dan pikirannya diucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus. Semoga Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Solok ini dapat memberikan manfaat secara optimal.

Kabupaten Solok, Februari 2024

Kepala Dinas
Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Solok



TETA MIDRA, S.STP, M.Si
NIP 19821022 200112 2 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok ini merupakan bentuk pertanggung jawaban atas perjanjian kinerja Diskominfo Kabupaten Solok yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Diskominfo Kabupaten Solok Tahun 2021 - 2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis 2021-2026.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Diskominfo Kabupaten Solok ke depan. Pertama masih perlu peningkatan kualitas standar keamanan informasi berdasarkan hasil evaluasi audit eksternal mengenai penanganan password dan penanganan resiko. Kedua, kualitas standar pelayanan TIK agar dapat terukur pelaksanaannya perlu dilakukan evaluasi berupa audit internal dan tinjauan manajemen secara berkelanjutan. Ketiga, masih diperlukan usaha untuk memenuhi harapan masyarakat pada aspek keandalan dan empati dalam menunjang tingkat kualitas layanan penyelenggaraan informasi publik.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Diskominfo Kabupaten Solok dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

Kata pengantar.....	i
Ikhtisar eksekutif.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Struktur Organisasi.....	1
1.2. Tugas, Fungsi Perangkat Daerah.....	6
1.3. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	7
1.4. Sarana dan Prasarana.....	10
1.5. Keuangan.....	12
BAB II.....	15
PERENCANAAN KINERJA.....	15
2.1 Perencanaan Strategis.....	15
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	20
BAB III.....	27
AKUNTABILITAS KINERJA.....	27
3.1.Capaian Kinerja Tahun 2022.....	27
3.1.1. Sasaran 1. Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik.....	28
3.1.2. Sasaran 2. Terwujudnya Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.....	35
3.1.3. Sasaran 3 Terwujudnya penyediaan data statistik sektoral untuk perencanaan dan evaluasi Pembangunan Daerah.....	46
3.1.4. Sasaran 4. Terwujudnya Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi dan komunikasi	49
3.1.5. Sasaran 5. Meningkatnya Tatakelola Organisasi.....	52
3.2 Realisasi Anggaran.....	63
BAB IV.....	65
PENUTUP.....	65

DAFTAR TABEL

Tabel. 1.1. Tabel Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	7
Tabel. 1.2. Tabel Data Pegawai Berdasarkan Golongan.....	8
Tabel. 1.3. Tabel Data Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	9
Tabel. 1.4. Rekapitulasi Sumber Daya Diskominfo Tahun 2022.....	10
Tabel. 1.5. Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Diskominfo Tahun 2022.....	11
Tabel 1.6 Anggaran Belanja Diskominfo Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2022.....	12
Tabel 1.7. Pemetaan Permasalahan untuk Menentukan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	13
Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	19
Tabel 2.2 perjanjian kinerja tahun 2022 Dinas komunikasi dan informatika.....	21
Tabel 2.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	22
Tabel 3.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021-2026.....	27
Tabel 3.2 Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik.....	29
Tabel 3.3 Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja.....	30
Tabel 3.4 Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional, Provinsi dan Kabupaten.....	31
Tabel 3.5 Efektivitas Penggunaan Sumber Daya.....	31
Tabel 3.6 Program, Anggaran dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.....	32
Tabel 3.7 Nilai Keterbukaan Informasi Publik.....	33
Tabel 3.8 Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja.....	34
Tabel 3.9 Sub kegiatan Pelayanan informasi publik.....	35
Tabel 3.10 Efektivitas Penggunaan Sumber Daya.....	35
Tabel 3.11 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).....	36
Tabel 3.12 Kinerja serta Capaian Kinerja.....	36
Tabel 3.13 Lima Besar Nilai SPBE Sumatra Barat.....	37
Tabel 3.14 Efektivitas Penggunaan Sumber Daya	38
Tabel 3.15 Program/Kegiatan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	40
Tabel 3.16 Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.....	41
Tabel 3.17 Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja.....	41
Tabel 3.18 Perbandingan Nasional dan Provinsi.....	42
Tabel 3.19 Efektivitas Penggunaan Sumber Daya	43
Tabel 3.20 Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Target Kinerja	45
Tabel 3.21 Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam Menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.....	46
Tabel 3.22 Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja.....	46

Tabel 3.23 Perbandingan Nasional, Provinsi dan Kab. Solok.....	47
Tabel 3.24 Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Target Kinerja.....	48
Tabel 3.25 Efektivitas Penggunaan Sumber Daya.....	49
Tabel 3.26 Persentase indeks KAMI.....	49
Tabel 3.27 Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja.....	50
Tabel 3.28 Persentase indeks KAMI.....	51
Tabel 3.29 Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Target Kinerja.....	52
Tabel 3.30 Efektivitas Penggunaan Sumber Daya.....	52
Tabel 3.31 Nilai Akuntabilitas Kinerja.....	53
Tabel 3.32 Kategori Nilai Akuntabilitas Kinerja.....	53
Tabel 3.33. Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja.....	54
Tabel 3.34 Komponen yang dinilai Nilai Akuntabilitas Kinerja.....	54
Tabel 3.35. program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan target kinerja.....	56
Tabel 3.36 Efektivitas Penggunaan Sumber Daya.....	56
Tabel 3.37 Pertanyaan Untuk mengukur Nilai Indeks Kepuasan Aparatur di dokumen Renstra.....	57
Tabel 3.38 Nilai kinerja unit pelayanan.....	58
Tabel 3.39. Nilai Kepuasan Aparatur.....	58
Tabel 3.40. Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja.....	59
Tabel 3.41. Perbandingan Nasional, Provinsi dan Kab. Solok.....	59
Tabel 3.42. Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Target Kinerja.....	60
Tabel 3.43 Efektivitas Penggunaan Sumber Daya.....	61
Tabel 3.44 Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2022.....	64

BAB I PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok (Diskominfo) Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Solok Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Diskominfo Kabupaten Solok Tahun 2023 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Diskominfo Kabupaten Solok
2. Mendorong Diskominfo Kabupaten Solok dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Diskominfo Kabupaten Solok untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Diskominfo Kabupaten Solok di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1. Struktur Organisasi

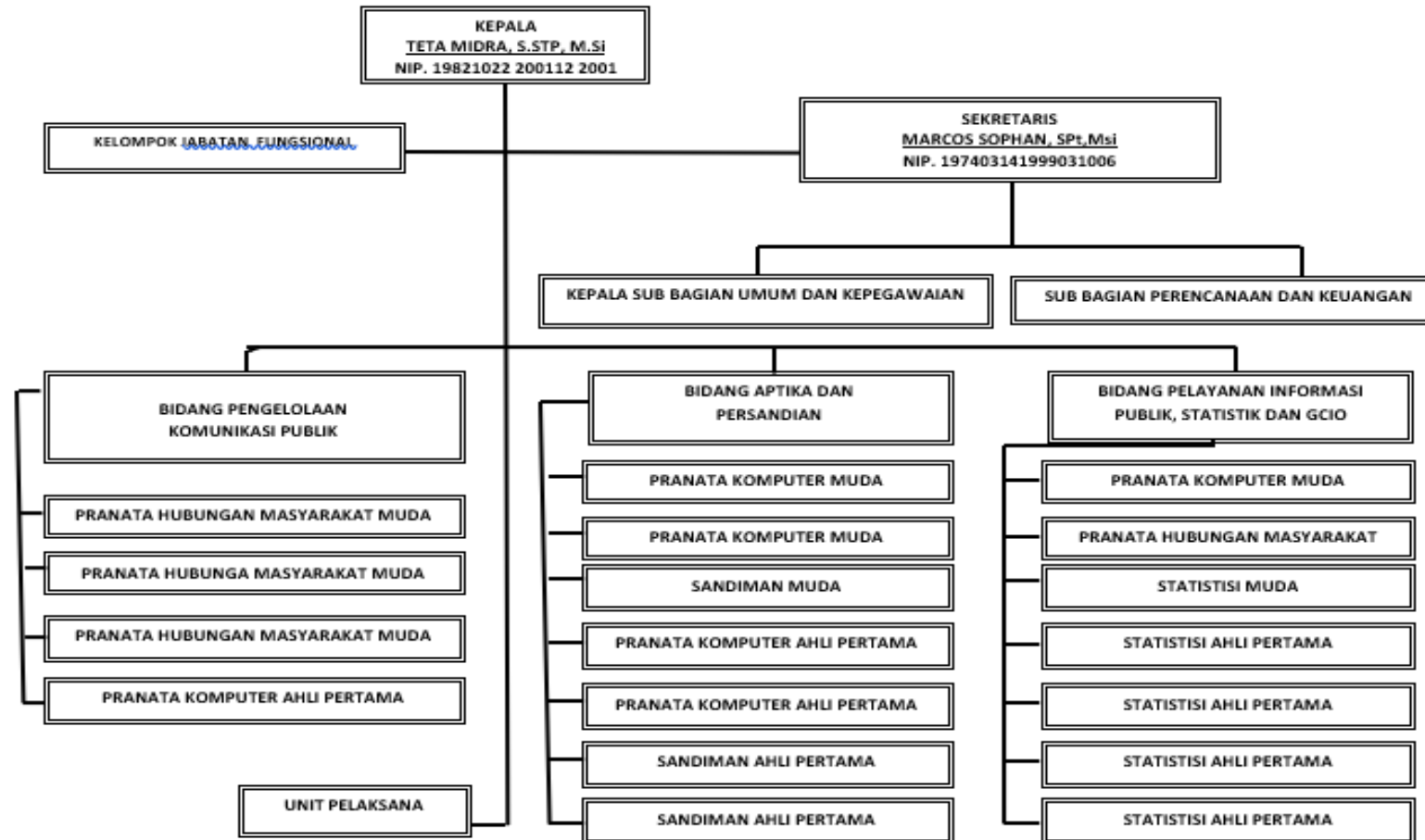
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut :

Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok, yaitu:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

- c. Bidang Aptika dan Persandian, membawahi :
 - Pranata Komputer Muda
 - Sandiman Muda
 - Pranata Komputer Ahli Pertama
 - Sandiman Ahli Pertama
- d. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, membawahi :
 - Pranata Hubungan Masyarakat Muda
 - Pranata Komputer Ahli Pertama
- e. Bidang Pelayanan Informasi Publik, Statistik, dan GCIO, membawahi :
 - Pranata Komputer Muda
 - Pranata Hubungan Masyarakat
 - Statistisi Muda
 - Statistisi Ahli Pertama

STRUKTUR ORGANISASI



Adapun Tugas dan Fungsi dari masing-masing unsur dalam struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok, sebagai berikut:

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan bimbingan teknis di bidang urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Dinas meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, perencanaan dan kepegawaian serta rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. Penyusunan program dan anggaran meliputi penyusunan Renstra, Renja dan RKA;
2. Pembuatan laporan bulanan, triwulan, dan laporan akhir tahun,
3. Penyelenggaraan Administrasi perkantoran yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, hukum, organisasi dan hubungan masyarakat;
4. Penyelenggaraan urusan keuangan dan kelengkapan yang meliputi perbendaharaan, pendapatan, pengelolaan barang milik daerah, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan, monitoring dan pelaporan.

C. Bidang Aptika dan Persandian

Bidang Aptika dan Persandian memiliki fungsi :

1. Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan daerah;
2. Layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah;

3. Layanan Keamanan Informasi *e-Government*;
4. Layanan Sistem Komunikasi intra pemerintah daerah;
5. Layanan manajemen data dan informasi *e-Government*;
6. Layanan akses internet dan intranet;
7. Layanan pengembangan dan pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan suplemen yang terintegrasi;
8. Integrasi layanan publik dan pemerintahan;
9. Penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart City*;
10. Penyelenggaraan *Government Chief Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah;
11. Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah daerah dan Masyarakat;
12. Pengelolaan Data Statistik Sektoral;
13. Layanan Pengelolaan Persandian; dan
14. Pengelolaan metode komunikasi sandi intra.

D. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik memiliki fungsi :

1. Merumuskan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik;
2. Monitoring dan pemilihan agenda prioritas pemerintah untuk mendukung kebijakan nasional dan pemda;
3. Penyediaan konten lintas sektoral;
4. Pengelolaan media komunikasi publik;
5. Fasilitasi penyelesaian sengketa informasi publik di daerah;
6. Pelayanan informasi publik; dan
7. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi.

E. Pelayanan Informasi Publik, Statistik, dan GCIO

1. Pelayanan informasi publik;
2. Layanan Keamanan Informasi *e-Government*;
3. Layanan manajemen data dan informasi *e-Government*;
4. Penyelenggaraan *Government Chief Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah;
5. Pengelolaan Data Statistik Sektoral;

1.2. Tugas, Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Solok No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, dijelaskan bahwa tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok sebagai berikut :

1.2.1 Tugas Pokok

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan bimbingan teknis di bidang urusan komunikasi dan informatika, urusan Statistik dan urusan Persandian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.2 Fungsi

Dalam menjalankan tugasnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. Penyusunan rumusan kebijakan teknis di Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian;
3. Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya Manusia (SDM) dan Infrastruktur TIK di Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

1.3. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok, dibutuhkan Sumber Daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung yang memadai.

1.3.1. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data kepegawaian yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok sampai dengan bulan Januari 2024, jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) atau pegawai sebanyak 44 (Empat Puluh Empat) orang dengan rincian 24 (Dua Puluh Empat) orang ASN dan 20 (Dua Puluh) orang non ASN. Jumlah Aparatur Diskominfo dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel. 1.1.
Tabel Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Uraian	Jenis Kelamin		Total	Persentase	
		Laki-laki	Perempuan		L	P
1	Kepala Dinas		1	1		6,6%
2	Sekretariat	5	4	9	16,6%	20%
3	Aptika dan Persandian	7	3	9	30%	13,3%
4	Pengelolaan Komunikasi Publik	10	5	15	40%	26,6%
5	Pelayanan Informasi Publik, Statistik, dan GCIO	4	5	9	13,3%	33,3%
JUMLAH		26	18	44	59%	41%

Sumber : Bezzeting Diskominfo Tahun 2023

Aparatur Diskominfo sesuai dengan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai Diskominfo sebanyak 44 Orang, terdiri dari laki-laki sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) orang atau 59% dan perempuan 18 (Delapan Belas) orang atau 41%, dimana lebih banyak laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Kondisi ini diakibatkan oleh kondisi kerja di Diskominfo yang membutuhkan tenaga teknis khususnya dalam pengembangan teknologi informasi, infrastruktur jaringan internet dan pembuatan konten video yang umumnya diminati oleh kaum laki-laki. Selain itu, dalam pelaksanaan pengelolaan informasi dan komunikasi publik juga membutuhkan aparatur

perempuan dalam pembuatan berita karena tingkat ketelitian yang tinggi. Sedangkan jumlah aparatur Diskominfo berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel. 1.2.

Tabel Data Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Golongan				Total
		I	II	III	IV	
1	Kepala Dinas				1	1
2	Sekretariat			2	1	3
3	Aptika dan Persandian			7		7
4	Pengelolaan Komunikasi Publik			4	1	5
5	Pelayanan Informasi Publik, Statistik, dan GCIO			6	2	8
JUMLAH				19	5	24

Sumber : Bezzeting Diskominfo Tahun 2023

Berdasarkan golongan, aparatur Diskominfo didominasi oleh golongan III yaitu sebanyak 19 (Sembilan Belas) orang atau sebesar 79,16% dan golongan IV sebanyak 5 (Lima) orang atau sebesar 20,84% serta tidak ada golongan I dan II pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok. Banyaknya aparatur pada golongan III disebabkan karena masa kerja yang sudah lama dan beberapa aparatur memang diangkat langsung pada golongan III. Selain berdasarkan jenis kelamin dan golongan, tingkat pendidikan juga dijadikan dasar untuk penempatan aparatur Diskominfo. Bukan hanya tinggi rendahnya pendidikan yang akan menjadi ukuran tetapi juga keberagaman latar belakang spesifikasi ilmu yang dimiliki oleh aparatur. Jumlah aparatur Diskominfo berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel. 1.3.

Tabel Data Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jurusan	Total	Persentase
1	Pasca Sarjana (S2)		10	41,6%
		SAINS	3	12,5%
		Manajemen	3	12,5%
		Chief Information Officer	1	4,1%
		Ilmu Komunikasi	2	8,3%
		Komputer	1	4,1%
2	Sarjana (S1)		14	58,3%
		Komputer	7	29,1%
		Matematika	4	16,6%
		Ekonomi	1	4,1%
		Hukum	1	4,1%
		Pendidikan	1	4,1%
JUMLAH			24	100%

Sumber :Bezzeting Diskominfo Tahun 2023

Aparatur Diskominfo berasal dari latar belakang disiplin ilmu yang berbeda-beda. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikannya, aparatur paling banyak terdapat pada tingkat pendidikan S1 yaitu sebanyak 14 orang atau sebesar 41,6%. Tingkat pendidikan yang relatif tinggi untuk sebagian besar aparatur Diskominfo ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Diskominfo secara umum.

Keberadaan sumber daya manusia serta sumber daya sarana dan prasarana di Diskominfo dapat memperkuat keberadaan Diskominfo, sebaliknya jika tidak terpenuhi secara optimal juga dapat menjadi kelemahan yang akan memperlambat tercapainya kinerja. Adapun kekuatan dan kelemahan Diskominfo berdasarkan sumber daya yang ada dapat dilihat pada Tabel 1.4

Tabel. 1.4.
Rekapitulasi Sumber Daya Diskominfo Tahun 2023

No	Uraian	Kekuatan	Kelemahan
1	Sumber Daya Manusia		
	a. Berdasarkan jenis kelamin	Aparatur laki-laki lebih mendominasi daripada aparatur perempuan	Beberapa tugas tertentu lebih membutuhkan aparatur perempuan salah satunya dalam pengerjaan administrasi perkantoran
	b. Berdasarkan golongan	Aparatur Diskominfo didominasi oleh golongan III, sehingga secara kemampuan dalam menjalankan Tugas dan fungsi Diskominfo cukup baik	Aparatur Diskominfo golongan II sangat terbatas, sehingga untuk pekerjaan teknis seperti bendahara, administrasi perkantoran dan lainnya masih kekurangan personil
	c. Berdasarkan tingkat pendidikan	Aparatur Diskominfo didominasi oleh tamatan S1, sehingga mempunyai kemampuan yang cukup baik dalam menjalankan tugasnya	Diskominfo membutuhkan aparatur dengan klasifikasi pendidikan komputer/sandiman untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, sementara saat ini aparatur yang ada belum memenuhi dalam pelaksanaan kegiatan, walaupun ada jumlahnya masih sangat terbatas
2	Aset	Sudah tersedia sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas	Beberapa sarana dan prasarana masih kurang, seperti kendaraan operasional double garden untuk ke kecamatan yang sulit dijangkau

Sumber: Diskominfo Kab.Solok 2023

1.4. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana sangat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok. Adapun Rekapitulasi barang dan inventaris kantor yang tercatat sebagai aset Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada Tabel 1.5.

Tabel 1.5 Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Diskominfo Tahun 2023

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	KONDISI		
				B	RR	RB
1	Kendaraan Dinas Roda 4	3	Unit	3	-	-
2	Sepeda Motor	1	Unit	1	-	-
3	Filling Kabinet Besi	2	Unit	2	-	-
4	Mesin Ketik Manual	1	Unit	1	-	-
5	Mesin Absensi	49	Unit	49	-	-
6	CCTV	16	Unit	16	-	-
7	Personal Komputer	8	Unit	8	-	-
8	Laptop/Notebook	30	Unit	30	-	-
9	Tablet	1	Unit	1		
10	Mainframe	1	Unit	1	-	-
11	Printer	12	Unit	12	-	-
12	Server	4	Unit	4	-	-
13	Router	4	Unit	4	-	-
14	Hub	1	Unit	1	-	-
15	Lemari Kayu	8	Unit	8	-	-
16	Meja	36	Unit	36	-	-
17	Kursi	65	Unit	65	-	-
18	AC Window	3	Unit	3	-	-
19	Televisi	3	Unit	3	-	-
20	Peralatan Studio	17	Paket	17	-	-
21	Tabung Gas	1	Unit	1	-	-
22	Camera Film	7	Unit	7	-	-
23	Lambang Instansi	1	Unit	1	-	-
24	Alat Komunikasi Radio	7	Unit	7	-	-
25	Faximile	1	Unit	1	-	-
26	Pemancar Radio	2	Unit	2	-	-
27	Genset	2	Unit	2	-	-
28	Screen Pembatas	3	Unit	3	-	-
29	Uninterupted Power Supply	1	Unit	1	-	-
30	Tool Kit Set	5	Paket	5	-	-
31	MesinPemotongRumput	1	Unit	1	-	-
32	Lemari Es	1	Unit	1	-	-
33	RakPiring	1	Unit	1	-	-
34	Tangga	1	Unit	1	-	-
35	Layar Projector	1	Unit	1	-	-
36	Stabilizer	1	Unit	1	-	-
37	PerangkatWifi	2	Unit	2	-	-
JUMLAH		303		303		

Sumber :Rekapitulasi Asset DiskominfoTahun 2023

1.5. Keuangan

Anggaran (belanja langsung) yang tersedia untuk melaksanakan fungsi dan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok sebagian besar berasal dari APBD Daerah Kabupaten Solok. Rincian anggaran yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok adalah seperti tabel dibawah ini:

**Tabel 1.6 Anggaran Belanja Diskominfo Kabupaten Solok Tahun
Anggaran 2023**

No	SUMBER DANA	BESARAN ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE
1	APBD	Rp. 9.014.979.411,00	100%
	Total	Rp. 9.014.979.411,00	100 %

Sumber: Diskominfo Kab. Solok 2023

Sumber dana APBD Diskominfo Kabupaten Solok sebesar Rp. 9.014.979.411,00 terdiri dari belanja operasi dan belanja modal, yang mana belanja tersebut berasal dari APBD yaitu sebesar 100%. Anggaran APBD digunakan untuk membiayai 5 Program, 10 Kegiatan dan 24 Sub kegiatan.

1.6. Isu Strategi dan Permasalahan Utama

Isu-isu strategi berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus dikedepankan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Dengan memperhatikan berbagai faktor–faktor kunci keberhasilan Dinas Kominfo, maka dapat disampaikan beberapa isu-isu strategis dalam rangka peningkatan peranan pengawasan antara lain :

1. Belum optimalnya penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika;
2. Kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan informasi publik yang terbaharukan (*terupdate*) dan benar adanya serta dapat dipertanggungjawabkan;

3. Semakin berkembangnya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dapat dimanfaatkan untuk percepatan penyelenggaraan SPBE;
4. Belum optimalnya penyediaan data untuk perencanaan pembangunan daerah;
5. Masih rendahnya keamanan komunikasi dan informasi daerah.

Tabel 1.7.
Pemetaan Permasalahan untuk Menentukan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Belum optimalnya penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Belum optimalnya integrasi sistem aplikasi.	Belum optimalnya pengembangan Sistem Aplikasi Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
		Pemanfaatan sebagian aplikasi belum diiringi dengan penyusunan regulasi yang relevan.	Masih Rendahnya penyusunan regulasi untuk pemanfaatan aplikasi.
		Masih adanya daerah <i>Blankspot</i>	Kantor Wilayah Kabupaten Solok yang berbukit-bukit sehingga susahnya pengembangan pembangunan menara telekomunikasi dan jangkauan jaringan internet.
2	Belum optimalnya Penyebarluasan Informasi Publik	Masih kurangnya sarana dan prasarana penyebarluasan informasi	Masih rendahnya komitmen Pemerintah dalam pemanfaatan sarana dan prasarana untuk penyebarluasan informasi
3	Belum optimalnya Penerapan Satu Data Indonesia	Belum optimalnya ketersediaan dan pemanfaatan data statistik sektoral dan lemahnya validasi data dan informasi perencanaan pembangunan berbasis elektronik	Belum optimalnya pengembangan sistem aplikasi penyediaan data statistik sektoral
		Belum optimalnya layanan data dan informasi statistik sektoral.	masih rendahnya pemahaman beberapa OPD yang telah menyampaikan datanya sendiri saat dilakukan verifikasi dan validasi Masih rendahnya penyampaian data oleh OPD yang dikumpulkan oleh Diskominfo

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
4	Sistem informasi dan komunikasi belum memiliki sistem keamanan persandian	Belum ada regulasi yang mengatur tentang keamanan komunikasi dan informasi	Masih terbatasnya SDM pengelola keamanan informasi dan persandian sehingga belum tersedianya regulasi tentang keamanan komunikasi dan informatika
		Masih rendahnya kesadaran aparatur maupun masyarakat akan pentingnya keamanan informasi (<i>security awarness</i>)	Masih rendahnya pengetahuan aparatur dan masyarakat tentang keamaan informasi
		Belum optimalnya <i>Vurnerability Asessment</i> (VA) pengaman informasi baik jaringan maupun aplikasi.	Masih terbatasnya kemampuan SDM dalam melaksanakan pengamanan informasi, serta masih rendahnya penyediaan sarana dan prasarana untuk pengamanan infomasi baik jaringan maupun aplikasi

Sumber: Dinas Kominfo kab.Solok 2023

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Rencana program/kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika mengacu pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 2021 – 2026. Rumusan Rencana Strategis tersebut kemudian dijabarkan ke dalam rincian kegiatan tahunan dalam kurun waktu 2021-2026 dan direalisasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok dalam pengelolaan Informasi dan Telematika terutama mendukung kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok.

Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Begitupun dengan Renstra Diskominfo Tahun 2021-2026 mempunyai fungsi strategis sebagai berikut :

1. Sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Diskominfo dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Diskominfo;
3. Instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja Diskominfo agar pelaksanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan mengarah pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD;
4. Perjanjian Kinerja Kepala Diskominfo dengan Kepala Daerah; dan
5. Landasan terwujudnya fungsi penunjang perencanaan sesuai tugas pokok dan fungsi Diskominfo.

2.1.1. Visi dan Misi

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok tidak terlepas dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Solok yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2021-2026. Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati Solok terpilih periode tahun 2021-2026, yaitu:
“Mambangkik Batang Tarandam, Menjadikan Kabupaten Solok terbaik di

Sumatera Barat”

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah terpilih merupakan arah yang akan dilaksanakan dalam pembangunan di Kabupaten Solok pada masa depan daerah yang ingin dicapai dalam periode masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Untuk dapat mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Solok yang telah ditetapkan diatas, maka ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Solok 2021-2026 sebagai berikut:

Misi 1	:	Mengelola Anggaran Berbasis Kebutuhan Masyarakat
Misi 2	:	Meningkatkan Infrastruktur yang Berkeadilan
Misi 3	:	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Sektor Pertanian, UMKM, Perdagangan dan Pariwisata
Misi 4	:	Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Bersih
Misi 5	:	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas
Misi 6	:	Meningkatkan Tatanan Hidup Masyarakat Berlandaskan Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah

Keterkaitan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, terfokus pada Misi ke 4 (empat) yaitu **“Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Bersih”**. Berpedoman pada Visi dan Misi, maka sesuai tugas pokok dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas utama.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan Merupakan kondisi atau hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, melaksanakan Misi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah,

memecahkan permasalahan pembangunan daerah dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok merupakan implementasi dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Solok sesuai RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Berdasarkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok yaitu melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan Statistik dan urusan Persandian yang bertujuan untuk mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Solok tahun 2016-2021, maka Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tujuan antara lain :

- a. Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik
- b. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik
- c. Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi.

2. Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran tersebut diformulasikan secara **SMART**, yaitu: **Specific**: Dapat diidentifikasi dengan jelas, **Measurable**: Jelas dan terukur, **Achievable**: Dapat dicapai sesuai dengan kapasitas, kemampuan dan sumberdaya yang ada, **Relevant**: Ada keterkaitan antara target dengan tujuan, **Time Bond**: Ada jadwal waktu/periode pencapaian.

Adapun sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok tahun 2021-2026, sebagai berikut :

- a. Terwujudnya keterbukaan informasi publik
- b. Terwujudnya Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi
- c. Terwujudnya penyediaan data statistik sektoral untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah
- d. Terwujudnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi dan komunikasi
- e. Meningkatnya tatakelola organisasi.

2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja pemerintah Daerah, pada ketentuan umum pasal 1, disebutkan bahwa :

- Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
- Arah kebijakan adalah rumusan kerangka piker atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok merupakan langkah-langkah dan arah yang akan diambil untuk mencapai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Solok yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas sesuai dengan RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021-2026. Strategi Diskominfo secara rinci dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 2.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : “Mambangkik Batang Tarandam, Menjadikan Kabupaten Solok Terbaik di Sumatera Barat”			
Misi 4 : “Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Bersih”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik	Terwujudnya keterbukaan informasi public	Meningkatnya Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah Daerah	Penyediaan kebijakan teknis/regulasi penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik
			Pengelolaan opini dan aspirasi publik
			Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
			Pengelolaan Media Komunikasi Publik
			Pengelolaan layanan Informasi Publik
			Pengelolaan layanan Hubungan Media
			Pelaksanaan kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terwujudnya Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	Mewujudkan Penyelenggaraan SPBE	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
			Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
			Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah
			Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
			Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
			Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan Kota Cerdas
	Terwujudnya penyediaan data statistic sektoral untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Mewujudkan Pengelolaan Data Statistik Sektoral yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Membangun Meta data Statistik Sektoral
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
			Pengembangan Infrastruktur
	Terwujudnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi dan komunikasi	Meningkatkan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	Penyediaan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah
			Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
			Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah
			Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah
Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi	Meningkatnya tatakelola organisasi	Meningkatkan kualitas kinerja, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Perencanaan, Peanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelaksanaan Administrasian Umum Perangkat Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah

Sumber: Diskominfo Kab. Solok tahun 2023

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja pada tabel berikut merupakan Perjanjian Kinerja awal tahun 2023 pada tabel berikut:

**Tabel 2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah	79
		Indeks Keterbukaan Informasi Publik	65
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	2,8
		Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	78
		Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100
		Persentase Indeks KAMI	33
3.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja	81
		Nilai Kepuasan Aparatur	2,7

Sumber: Renstra Diskominfo Kab. Solok 2021-2026

2.2.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok yaitu

Tabel 2.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
Urusan Pemerintah an Bidang Komunikas i dan Informatik a			
	Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	53.438.000
		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	90.520.622
	Administrasi keuangan perangkat daerah		
		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	2.605.903.777
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	4.049.000
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	4.284.000
		Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	3.660.330

Sumber :Laporan Fisik dan keuangan tahun 2023

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
		Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	960.000
		Penyediaan bahan logistik kantor	16.439.630
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.153.300
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	454.669.000
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		
		Penyediaan jasa surat menyurat	500.000
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	74.191.674
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	119.930.595
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan,pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	197.749.016

Sumber :Laporan Fisik dan keuangan tahun 2023

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
		pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	39.714.000
Program Informasi dan Komunikasi Publik			
	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintahan daerah kabupaten/kota		
		Monitoring opini dan aspirasi publik	128.410.486
		Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	513.960.596
		Pelayanan informasi publik	47.275.990
		Layanan hubungan media	1.890.747.356
Program Aplikasi Informatika			
	Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota		
		Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah	2.355.248.439

Sumber :Laporan Fisik dan keuangan tahun 2023

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
	Pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota		
		Penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota	67.896.600
		Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	129.561.710
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik			
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral			
	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup pemerintah kabupaten/kota		
		Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	114.795.350
Urusan pemerintahan bidang persandian			
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/ kota		

Sumber :Laporan Fisik dan keuangan tahun 2023

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	90.919.940
TOTAL			9.014.979.411

Sumber :Laporan Fisik dan keuangan tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2023

Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Solok telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Diskominfo Kabupaten Solok Tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Berikut ditampilkan indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 dalam Tabel berikut :

Tabel 3.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021-2026

No	Indikator	PK Perubahan 2021	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A.	Urusan Komunikasi dan Informatika								
1	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	78%	77,76 %	78%	79%	80%	81%	82%	82%
2	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	60	N/A	60	65	70	80	85	85
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,3	2,3	2,5	2,8	3,0	3,2	3,4	3,4
4	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	75%	71,60 %	75%	78%	80%	85%	90%	90%
B.	Urusan Statistik								

No	Indikator	PK Perubahan 2021	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam Menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan Daerah	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
C.	Urusan Persandian								
6	Persentase Indeks KAMI	30%	26,9%	30%	33%	35%	40%	45%	45%
D.	Urusan Penunjang								
7	Nilai Akuntabilitas Kinerja	80	80	80	81	82	83	84	84
8	Indeks Kepuasan Aparatur	2,51	2,51	2,51	2,7	3,0	3,26	3,35	3,35

Sumber: Renstra Diskominfo Kabupaten Solok 2021-2026

3.1.1. Sasaran 1. Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik

1. Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik

Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik dapat diketahui melalui survei penyebar luasan informasi pembangunan pemerintah Kabupaten Solok yang telah dilakukan menggunakan kuesioner Online yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 5 pertanyaan dan 1 saran sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap keterbukaan informasi seputar pembangunan Kabupaten Solok dan pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.2 Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	79%	79%	100%

Sumber: Hasil survei penyebarluasan informasi pembangunan pemerintah kabupaten solok tahun 2023

Pada tabel 3.2 dapat dilihat bahwa Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik memiliki target 79% dan terealisasi sebesar 79%, sehingga persentase capaian sebesar 100%. Nilai tersebut didapat dari pelaksanaan survei penyebarluasan informasi pembangunan pemerintah Kabupaten Solok. Survei tersebut menggunakan 500 orang sampel dari 408.426 orang penduduk Kabupaten Solok yang dihitung berdasarkan Metode Slovin Formula. Dari 500 orang sampel diperoleh 396 orang terpapar informasi Pembangunan Kabupaten Solok.

Jika merujuk pada jumlah penduduk Kabupaten Solok yaitu 408.426 Orang diperoleh 322.655 Orang yang terpapar informasi pembangunan Kabupaten Solok, dimana capaiannya adalah sebesar 79%.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja

Realisasi kinerja serta capaian kinerja dalam persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik dapat dilihat pada tabel 3.3 di bawah ini:

Tabel 3.3 Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja

NO	Indikator Kinerja	Kondisi Awal		Target		Realisasi		Capaian		Target akhir RPJMD/Renstra	% Capaian akhir RPJMD/Renstra
		2021	2022	2022	2023	2022	2023	2022	2023		
1.	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	77,76%	78%	78	79%	78%	79%	100%	100%	82%	96,34%

Sumber: Dinas Kominfo kab. Solok tahun 2023

Dalam tabel 3.3 dapat dilihat bahwa target persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik pada tahun 2022 sebesar 78% terealisasi sebesar 78% capaian 100% dan pada tahun 2023 target sebesar 79% dan terealisasi sebesar 79% sehingga capaian kinerja tetap sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target akhir renstra yaitu 82% capaiannya sebesar 96,34%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional, Provinsi dan Kabupaten

Perbandingan Realisasi kinerja serta capaian kinerja dalam persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik dapat dilihat pada tabel 3.4 di bawah ini:

Tabel 3. 4 Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional, Provinsi dan Kabupaten

No	Indikator Kinerja	Nasional	Provinsi	Kabupaten Solok
1.	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	N/A	N/A	79%

Sumber: Dinas Kominfo Kab.Solok Tahun 2023

Sehubungan dengan persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik di Kabupaten Solok belum dapat diperoleh perbandingan realisasi kinerja baik dengan standar nasional maupun provinsi.

d. Analisa Atas Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya

1. Efisiensi

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Untuk efisiensi penggunaan sumber daya dapat diperoleh persentase efisiensinya mencapai 100%, upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa, pemberi masukan dan kerjasama meningkatkan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Solok.

2. Efektivitas

Efektivitas penggunaan sumber daya dapat diperoleh persentase sebagai berikut:

Rumus: $\text{Capaian Relisasi Indikator/Realisasi Anggaran} \times 100\%$

Tabel 3.5 Efektivitas Penggunaan Sumber Daya

C.R Indikator	R. Anggaran	Efektivitas
100%	89%	112,3%

Sumber: Dinas Kominfo Kab.Solok Tahun 2023

Pada tabel 3.5 dapat dilihat efektivitas penggunaan sumber daya adalah sebesar 112,3% itu berarti anggaran yang ada sudah dimanfaatkan dengan maksimal.

e. Analisa Program/Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Tabel 3.6 Program,Anggaran dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

No	Program /Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran tahun 2023 (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase realisasi
	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik		2.533.118.438	2.264.259.777	89%
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		2.533.118.438	2.264.259.777	89%
		Monitoring opini dan aspirasi publik	128.410.486	120.761.994	94%
		Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	513.960.596	467.138.163	91%
		Layanan Hubungan Media	1.890.747.356	1.676.359.620	89%

Sumber :Laporan Fisik dan keuangan tahun 2023

f. Rencana Tindak Lanjut Perbaikan

- 1) Melaksanakan rapat koordinasi mengenai penguatan peran dan fungsi PPID Pembantu di lingkup SKPD Kabupaten Solok.
- 2) Melaksanakan rapat koordinasi pembentukan SK Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan
- 3) Melaksanakan monitoring evaluasi ke PPID Pembantu oleh PPID Utama yang berada di Diskominfo untuk kemudian dilaporkan secara tertulis kepada PPID Utama (Sekretaris Daerah).
- 4) Memberikan *reward* atau *punishment* atas pencapaian target kinerja.

2. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

a. Perbandingan target dan realisasi Kinerja

Tabel 3.7 Nilai Keterbukaan Informasi Publik

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	65	84,89	130,6%

Sumber: Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2023

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai Keterbukaan Informasi publik tahun 2023 memiliki target 65 dan terealisasi sebesar 84,89 sehingga persentase capaian hanya 130,6%. Capaian tersebut didasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Sumatera Barat.

b. Analisa Penyebab Keberhasilan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

Penyebab Keberhasilan/Peningkatan Kinerja

- 1) Koordinasi dan kerjasama yang cukup baik antar SKPD di Kabupaten Solok terkait penyelenggaraan pelayanan informasi publik.
- 2) Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait aplikasi pengelolaan Daftar Informasi Publik yaitu telah tersedianya aplikasi PPID Kabupaten Solok

- 3) Telah diterbitkannya SK Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.

Alternatif Solusi yang telah dilakukan

1. Telah tersedianya SOP dan Rancangan Peraturan Bupati tentang pedoman pelayanan informasi publik di Kabupaten Solok.
2. Melakukan survei kepada masyarakat melalui kuisioner online.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja

Tabel 3.8 Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja

N O	Indikator Kinerja	Kondisi Awal		Target		Realisasi		% Capaian		Target akhir RPJM D/ Renstra	% Capaian akhir RPJMD/ Renstra
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		
1.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	40,58	84,89	60	65	40,58	84,89	67,63%	130,6%	85	99,8%

Sumber: Dinas Kominfo tahun 2023

Dalam tabel diatas dapat dilihat nilai Keterbukaan Informasi Publik adalah 65 dan terealisasi sebesar 84,89 sehingga capaian kinerja menjadi 130,6%. Jika dibandingkan dengan target akhir renstra yaitu 85 capaian akhir renstra terhadap tahun ini yaitu sebesar 99,8%.

d. Analisa Atas Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya

1. Efisiensi

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Untuk efisiensi penggunaan sumber daya dapat diperoleh persentase efisiensinya mencapai 130,6%, upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa, pemberi masukan dan Kerjasama meningkatkan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Solok.

2. Efektivitas

Efektivitas penggunaan sumber daya dapat diperoleh persentase sebagai berikut:

Rumus: $\text{Capaian Relisasi Indikator} / \text{Realisasi Anggaran} \times 100\%$

Dapat dilihat pada tabel 3.10 berikut:

Tabel 3.9 Efektivitas Penggunaan Sumber Daya

C.R Indikator	R. Anggaran	Efektivitas
130,6%	91%	143,5%

Sumber: Dinas Kominfo Tahun 2023

Pada tabel 3.10 dapat dilihat efektivitas penggunaan sumber daya adalah sebesar 143,5% itu berarti anggaran yang ada sudah dimanfaatkan dengan maksimal, namun dalam pencapaian target realisasi tidak terpenuhi sesuai yang telah ditetapkan dalam renstra.

e. Analisa Program / Kegiatan

Tabel 3.10 Sub kegiatan Pelayanan informasi publik

No	Program /Kegiatan	Analisa Subkegiatan	Anggaran tahun 2023 (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase realisasi
1		Pelayanan informasi publik	47.275.990	43.192.200	91%

Sumber :Laporan Fisik dan keuangan tahun 2023

Kegiatan yang menunjang nilai Keterbukaan Informasi publik adalah subkegiatan Pelayanan informasi publik dengan anggaran tahun 2023 sebanyak 47.275.990

3.1.2. Sasaran 2. Terwujudnya Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi

1. Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang lebih populer dikenal dengan istilah *E-Government* merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Untuk

mengetahui keberhasilan pelaksanaan SPBE di Kabupaten Solok, dilakukan evaluasi SPBE berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB RI Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.11 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,8	3,49	124,6%

Sumber: Laporan hasil pemantauan dari Kemenpan RB 2023

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Solok pada Tahun 2023 melebihi target yang telah ditetapkan, dimana target Tahun 2023 sebesar 2,8 dan terealisasi sebesar 3,49 sehingga persentase capaian menjadi 124,6%.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja

Tabel 3.12 Kinerja serta Capaian Kinerja

NO	Indikator Kinerja	Kondisi Awal		Target		Realisasi		% Capaian		Target akhir RPJMD/ Renstra	% Capaian akhir RPJMD/ Renstra
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,5	2,8	2,5	2,8	3,12	3,49	124,8%	124,6 %	3,4	102,6%

Sumber: Diskominfo Kabupaten Solok 2023

Dalam tabel diatas dapat dilihat bahwa target Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2022 adalah 2,5 terealisasi 3,12 dan pada tahun 2023 adalah 2,8 dan terealisasi sebesar 3,49 sehingga capaian kinerja meningkat menjadi 124,6 %.Jika dibandingkan dengan target akhir renstra yaitu 3,4 capaian akhir renstra terhadap tahun ini sebesar 102,6%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/ Kota

Target nasional yang ditetapkan untuk pencapaian SPBE Pemerintah Kabupaten Solok sebesar indeks **2,8** sedangkan indeks yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Solok pada tahun 2022 sebesar indeks **3,49** dengan kategori **BAIK** dibandingkan dengan Provinsi dan beberapa Kabupaten/Kota lainnya di Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten Solok mendapat peringkat 4 tingkat Provinsi Sumatera Barat dengan nilai sebagai berikut:

Tabel 3.13 Lima Besar Nilai SPBE Sumatra Barat

No	Nama Instansi	Indeks SPBE	Predikat
1	Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	4,17	Sangat Baik
2	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	3,75	Sangat Baik
3	Pemerintah Kota Padang	3,54	Sangat Baik
4	Pemerintah Kabupaten Solok	3,49	Baik
5	Pemerintah Kota Solok	3,37	Baik

Sumber: Laporan hasil pemantauan dari Kemenpan RB 2023

d. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

Penyebab Keberhasilan/ Peningkatan Kinerja

- 1) Terpilihnya Kabupaten Solok dalam Program 100 Smart City memberikan kesempatan yang luas dalam mengembangkan SPBE di Kabupaten Solok
- 2) Kabupaten Solok cukup pro aktif dalam memanfaatkan aplikasi yang diadopsi dari pemerintah pusat atau daerah lain yang relevan
- 3) Kordinasi dan kerjasama yang cukup baik antar SKPD di Kabupaten Solok dalam penyelenggaraan SPBE
- 4) Telah melaksanakan integrasi beberapa aplikasi seperti Srikandi, Situnkin dll.

Alternatif Solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan rancangan regulasi yang mengatur penyelenggaraan SPBE
2. Menyusun Rencana Induk SPBE yang tertuang di dalam Rencana Induk Smart City
3. Rekrutmen CPNS dengan latar belakang pendidikan TIK

e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Efisiensi

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Untuk efisiensi penggunaan sumber daya dapat diperoleh persentase efisiensinya mencapai 124,6% upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa, pemberi masukan dan Kerjasama meningkatkan nilai SPBE.

2. Efektivitas

Efektivitas penggunaan sumber daya dapat diperoleh persentase sebagai berikut:

Rumus: $\text{Capaian Relisasi Indikator/Realisasi Anggaran} \times 100\%$

Dapat dilihat pada tabel 3.15 berikut:

Tabel 3.14 Efektivitas Penggunaan Sumber Daya

C.R Indikator	R. Anggaran	Efektivitas
124,6%	89%	140%

Sumber: Diskominfo Kabupaten Solok 2023

Pada tabel 3.15 dapat dilihat efektivitas penggunaan sumber daya adalah sebesar 140% itu berarti anggaran yang ada sudah dimanfaatkan dengan maksimal dalam pencapaian target yang ditentukan.

f. Analisis Program/Kegiatan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Dalam rangka menunjang keberhasilan penyelenggaraan SPBE ada beberapa upaya dilakukan sebagai berikut :

- 1) Untuk pemanfaatan aplikasi umum berbagi pakai, dilaksanakan Bimtek bagi aparaturnya setiap SKPD. Hal tersebut merupakan Langkah untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam implementasi SPBE.
- 2) Menyatukan anggaran untuk penyediaan bandwidth masing-masing SKPD/ Kecamatan dan Puskesmas. Pemerintah Kabupaten Solok telah melakukan MoU dengan PLN Icon Plus (PT. Indonesia Comnets RI) dalam penyediaan jaringan internet dimana PLN Icon Plus menyediakan sarana dan prasarana/ perangkat jaringan dan Pemerintah Kabupaten Solok melalui Dinas Komunikasi dan Informatika berlangganan bandwidth/ jaringan. Hal tersebut merupakan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan membangun jaringan sendiri atau berlangganan bandwidth per SKPD.
- 3) Untuk penghematan anggaran dalam penyediaan aplikasi, diharapkan setiap SKPD/OPD agar secara pro aktif memanfaatkan/ mengadopsi aplikasi yang sudah ada (dari pusat atau dari daerah lain). Jika aplikasi dibangun atau dibuat sendiri akan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, puluhan juta bahkan sampai ratusan juta rupiah. Namun jika kita bisa mengadopsi aplikasi yang sudah ada, tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak, bahkan bisa saja gratis.
- 4) Diminta setiap SKPD / OPD agar dapat pro aktif dalam mencari referensi (melalui sharing informasi dengan daerah lain) dalam menyusun regulasi penerapan SPBE.
- 5) Memanfaatkan dana CSR seperti dengan PT. Aqua yang berdomisili di Arosuka untuk penyediaan Videotron. Untuk penyediaan videotron juga membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, untuk itu perlu dimanfaatkan peluang lain salah satunya dari hibah PT Aqua berupa satu unit videotron.

Tabel 3.15 Program/Kegiatan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

No	Program/Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran tahun 2023 (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
	Program aplikasi informatika		197.458.310	175.602.603	89%
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Solok	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	67.896.600	64.103.850	94%
		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik	129.561.710	77.998.753	60%

Sumber: Lapsik Bulan Desember Diskominfo 2023

g. Rencana Tindak Lanjut Perbaikan

Sebagai tindak lanjut dari rangkaian hasil Evaluasi SPBE di Kabupaten Solok Tahun 2021, maka dihimbau kepada SKPD terkait untuk melakukan upaya peningkatan antara lain :

- 1) Mengesahkan dan menerapkan regulasi (Peraturan Bupati) mengenai penerapan SIMPEG (Sistem Informasi Kepegawaian) oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- 2) Menyusun Regulasi tentang Pengelolaan Pusat Data serta Pemanfaatan Aplikasi Umum Berbagi Pakai (Data Center) oleh Dinas Komunikasi dan Informatika
- 3) Menyusun Regulasi tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Terintegrasi oleh Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi (merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018
Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.

4) Memberikan *reward* atau *punishment* atas pencapaian target kinerja

2.Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.16 Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	78%	78%	100%

Sumber: Diskominfo Kabupaten Solok 2023

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi memiliki target 78% dan terealisasi sebesar 78% sehingga persentase capaian menjadi 100%.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja

Tabel 3.17 Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja

NO	Indikator Kinerja	Kondisi Awal		Target		Realisasi		% Capaian		Target akhir RPJMD/ Renstra	% Capaian akhir RPJMD/ Renstra
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		
1	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	75%	78%	75 %	78%	75 %	78%	100 %	100%	90%	86,6%

Sumber: Diskominfo Kabupaten Solok 2023

Dalam tabel diatas dapat dilihat bahwa target persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi pada tahun

2022 yaitu 75% terelisasi 75% capaian kinerja 100% dan pada tahun 2023 Target 78% dan terealisasi sebesar 78% sehingga capaian kinerja juga 100%. Jika dibandingkan dengan target akhir renstra yaitu 90% capaian akhir renstra terhadap tahun ini yaitu sebesar 86,6%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/ Kota

Perbandingan Realisasi kinerja serta capaian kinerja dalam Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.18 Perbandingan Nasional dan Provinsi

No	Indikator Kinerja	Nasional	Provinsi	Kabupaten Solok
1.	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	N/A	N/A	78%

Sumber: Diskominfo Kabupaten Solok 2023

Sehubungan dengan persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi di Kabupaten Solok Pada tahun 2023 memiliki target 78% dan terealisasi sebesar 78%. Namun belum dapat diperoleh perbandingan realisasi kinerja baik dengan standar nasional dan provinsi.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

Penyebab keberhasilan/ peningkatan kinerja:

- 1) Penyelenggaraan layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi sangat sejalan dengan capaian SPBE
- 2) Kabupaten Solok cukup aktif dalam memanfaatkan aplikasi dari pemerintah pusat atau daerah lain yang relevan
- 3) Kordinasi dan kerjasama yang cukup baik antar SKPD di Kabupaten Solok dalam penyelenggaraan layanan publik yang diselenggarakan secara online.

Alternatif solusi yang dilakukan adalah:

Menyiapkan rancangan regulasi yang mengatur penyelenggaraan layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.

e. Analisisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Efisiensi

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Untuk efisiensi penggunaan sumber daya dapat diperoleh persentase efisiensinya mencapai 100% upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa, pemberi masukan dan Kerjasama meningkatkan nilai SPBE.

2. Efektivitas

Efektivitas penggunaan sumber daya dapat diperoleh persentase sebagai berikut:

Rumus: $\text{Capaian Relisasi Indikator/Realisasi Anggaran} \times 100\%$

Dapat dilihat pada tabel 3.19 berikut:

Tabel 3.19 Efektivitas Penggunaan Sumber Daya

C.R Indikator	R. Anggaran	Efektivitas
100%	91%	109,8%

Sumber: Diskominfo Kabupaten Solok 2023

Pada tabel 3.20 dapat dilihat efektivitas penggunaan sumber daya adalah sebesar 109,8% itu berarti anggaran yang ada sudah dimanfaatkan dengan maksimal dalam pencapaian target yang ditentukan.

f. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Dalam rangka menunjang keberhasilan penyelenggaraan layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dilakukan upaya sebagai berikut :

- 1) Untuk pemanfaatan aplikasi umum berbagi pakai, dilaksanakan Bimtek bagi aparatur setiap SKPD. Hal tersebut merupakan Langkah untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam implementasi penyelenggaraan layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi
- 2) Menyatukan anggaran untuk penyediaan bandwidth masing-masing SKPD/ Kecamatan dan Puskesmas. Pemerintah Kabupaten Solok telah melakukan MoU dengan P PLN Icon Plus dalam penyediaan jaringan internet dimana PLN Icon Plus menyediakan sarana dan prasarana/ perangkat jaringan dan Pemerintah Kabupaten Solok melalui Dinas Komunikasi dan Informatika berlangganan bandwidth/ jaringan. Hal tersebut merupakan efisiensi anggaran dibandingkan dengan membangun jaringan sendiri atau berlangganan bandwidth per SKPD.
- 3) Untuk penghematan anggaran dalam penyediaan aplikasi, diharapkan setiap SKPD/OPD agar secara aktif memanfaatkan aplikasi yang sudah ada (dari pusat atau dari daerah lain). Jika aplikasi dibangun atau dibuat sendiri akan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, puluhan juta bahkan sampai ratusan juta rupiah. Namun jika kita bisa mengadopsi aplikasi yang sudah ada, tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak, bahkan bisa saja gratis.

Tabel 3.20 Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

No	Program/ Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran tahun 2023 (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi
	PROGRAM APLIKASI DAN INFORMATIKA		2.355.248.439	2.141.755.733	91%
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		2.355.248.439	2.141.755.733	91%
		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.355.248.439	2.141.755.733	91%

Sumber: Lapsik bulan Desember tahun 2023

g. Rencana Tindak Lanjut Perbaikan

Sebagai tindak lanjut dari rangkaian penyelenggaraan layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi di Kabupaten Solok Tahun 2023, maka dihimbau kepada SKPD terkait untuk melakukan upaya peningkatan dan mendorong OPD untuk melaksanakan layanan publik secara online dan terintegrasi.

Kebutuhan penambahan titik jaringan yang sudah melebihi 100 titik, meskipun telah dilakukan pelayanan aplikasi dan jaringan internet secara terpadu namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaan berupa makin meningkatnya kebutuhan atau penambahan titik layanan jaringan internet karena adanya permintaan OPD, kapasitas jaringan saat ini (500 Mbps) dirasa tidak dapat mengakomodir, sehingga menimbulkan keluhan internet lambat dari OPD yang berdampak terhadap layanan online atau digital pada OPD tersebut, untuk itu Dinas Kominfo

selanjutnya pada tahun 2024 mengusulkan peningkatan kapasitas bandwidth dari 500 Mbps menjadi 1000 Mbps guna kelancaran pelayanan intranet maupun internet pada OPD di kabupaten Solok

3.1.3. Sasaran 3. Terwujudnya penyediaan data statistik sektoral untuk perencanaan dan evaluasi Pembangunan Daerah.

1. Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah :

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3. 21 Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam Menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam Menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%	100%

Sumber: Diskominfo Kabupaten Solok 2023

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam Menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah memiliki target 100% dan terealisasi sebesar 100% sehingga persentase capaian menjadi 100%.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja

Tabel 3.22 Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja

N O	Indikator Kinerja	Kondisi Awal		Target		Realisasi		% Capaian		Target akhir RPJM D/ Renstr a	% Capaian akhir RPJMD/ Renstra
		202 2	2023	202 2	2023	202 2	2023	202 2	2023		
1 .	Persentase perangkat daerah yang menggunakan	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%

	data statistik dalam Menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	%	%	%	%	%	%	%	%		
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

Sumber: Diskominfo Kabupaten Solok 2023

Dalam tabel diatas dapat dilihat bahwa target persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam Menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah pada tahun 2022 yaitu target 100%, terealisasi sebesar 100%, pada tahun 2023 yaitu target 100% dan terealisasi sebesar 100% capaian kinerja tahun 2022 dan 2023 adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target akhir renstra yaitu 100% capaian akhir renstra terhadap tahun ini yaitu sebesar 100%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/ Kota

Perbandingan realisasi kinerja dalam persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.23 Perbandingan Nasional, Provinsi dan Kab. Solok

No	Indikator Kinerja	Nasional	Provinsi	Kabupaten Solok
1.	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam Menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	N/A	N/A	100%

Sumber: Diskominfo Kabupaten Solok 2023

Pencapaian IKU persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam Menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah pada tahun 2023 memiliki target 100% dan terealisasi 100%. Namun belum ada data yang dapat dijadikan pedoman perbandingan realisasi kinerja dengan standar Nasional dan Provinsi.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

Data statistik merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan pembangunan, salah satu produk statistik yang

dihasilkan setiap tahun adalah Daerah Dalam Angka (Kabupaten Solok Dalam Angka). Dinas Kominfo Dalam penyusunan dokumen perencanaan mengacu kepada dokumen Daerah Dalam Angka.

agar perencanaan pembangunan daerah dapat dilaksanakan dengan tepat, dibutuhkan ketersediaan data yang akurat mutakhir, terpadu dapat dipertanggung jawabkan, mudah diakses dan dibagi pakaikan untuk itu pelaksanaan statistik daerah harus menganut prinsip satu data indonesia pada satu sumber/portal resmi daerah.

e. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pengelolaan atau penyusunan data statistik Pemerintah Kabupaten Solok telah membentuk forum satu data tingkat Kabupaten Solok yang terdiri dari BPS sebagai pembina data, Diskominfo sebagai wali data, Bapelitbang sebagai koordinasi atau sekretariat data dan OPD sebagai produsen data.

1. Efisiensi

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Untuk efisiensi penggunaan sumber daya dapat diperoleh persentase efisiensinya mencapai 100% upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa, pemberi masukan dan Kerjasama.

2. Efektivitas

Efektivitas penggunaan sumber daya dapat diperoleh persentase sebagai berikut:

Rumus: $\text{Capaian Relisasi Indikator} / \text{Realisasi Anggaran} \times 100\%$

Dapat dilihat pada tabel 3.25 berikut:

Tabel 3.24 Efektivitas Penggunaan Sumber Daya

C.R Indikator	R. Anggaran	Efektivitas
100%	89%	112,3%

Sumber: Diskominfo Kabupaten Solok 2023

Pada tabel 3.25 dapat dilihat efektivitas penggunaan sumber daya adalah sebesar 112,3% itu berarti anggaran yang ada sudah dimanfaatkan dengan maksimal dalam pencapaian target yang ditentukan.

f. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Tabel 3.25 Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

No	Program/ Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran tahun 2023(Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi
	Program penyelenggaraan statistik sektoral		114.795.350	102.505.422	89%
	Penyelenggaraan statistik sektoral dilingkup daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	114.795.350	102.505.422	89%

Sumber:Laporan Fisik dan Keuangan 2023

g. Rencana Tindak Lanjut Perbaikan

Terkait penyelenggaraan data statistik sektoral di Kabupaten Solok perlu optimalisasi pelaksana peran forum Satu Data Indonesia, Solok Dalam Angka menghasilkan data statistik sektoral yang akurat dan berkualitas.

3.1.4. Sasaran 4. Terwujudnya Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi dan komunikasi

1. Persentase indeks KAMI

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.26 Persentase indeks KAMI

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1	Persentase indeks KAMI	33%	33%	100%

Sumber: Indeks kami diskominfo 2023

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase indeks KAMI memiliki target 33% dan terealisasi sebesar 33% sehingga persentase capaian menjadi 100%.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja

Tabel 3.27 Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja

NO	Indikator Kinerja	Kondisi Awal		Target		Realisasi		% Capaian		Target akhir RPJM D/ Renstra	% Capaian akhir RPJM D/ Renstra
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		
1.	Persentase indeks KAMI	30%	33%	30%	33%	31,3 %	33%	104,3 %	100 %	45%	73,3%

Sumber: Diskominfo Kabupaten Solok 2023

Dalam tabel diatas dapat dilihat bahwa target persentase indeks KAMI pada tahun 2022 yaitu 30% terealisasi sebesar 31,3% dan pada tahun 2023 adalah 33% dan terealisasi sebesar 33% sehingga capaian kinerja tahun 2022 104,3% dan 2023 sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target akhir renstra yaitu 45% capaian akhir renstra terhadap tahun ini yaitu sebesar 73,3%.

Indeks KAMI merupakan indikator dalam mengevaluasi tingkat kematangan, tingkat kelengkapan Penerapan SNI 150/IEC 2700 I 2009 serta peta atau tata kelola keamanan sistem informasi disuatu instansi pemerintah daerah

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional/ Provinsi/Kabupaten/Kota

Perbandingan realisasi kinerja dalam persentase indeks KAMI dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.28 Persentase indeks KAMI

No	Indikator Kinerja	Nasional	Provinsi	Kabupaten Solok
1.	Persentase indeks KAMI	N/A	N/A	33%

Sumber: Diskominfo Kabupaten Solok 2023

Persentase indeks KAMI Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Solok tahun 2023 memiliki target 33% dan terealisasi 33% berarti capaiannya sudah 100%. Belum ada data yang dapat dijadikan pedoman perbandingan realisasi kinerja dengan standar Nasional. Namun jika dibandingkan provinsi, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok masih termasuk kategori rendah dikarenakan Dinas Kominfo Kabupaten Solok baru mulai melengkapi dokumen Indeks KAMI sementara provinsi sudah ada bidang persandian dari tahun 2019 dan memiliki banyak SDM yang berkompeten dibidang persandian dan keamanan informasi sandi.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

Sistem elektronik yang dikelola pada Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Solok masih termasuk dalam kategori rendah dikarenakan nilai investasi pada system elektronik, anggaran operasional dan standar keamanannya masih kecil untuk dapat meningkatkan skor indeks KAMI membutuhkan rangkaian kebijakan dan prosedur keamanan informasi.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kondisi pengelolaan keamanan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok masih jauh dari harapan, butuh SDM dan sumber daya anggaran yang lebih untuk dapat meningkatkan indeks.

1. Efisiensi

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Untuk efisiensi penggunaan sumber daya dapat diperoleh persentase efisiensinya mencapai 104,3% upaya efisiensi penggunaan sumber daya

manusia telah dilaksanakan dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa, pemberi masukan dan Kerjasama.

2. Efektivitas

Efektivitas penggunaan sumber daya dapat diperoleh persentase sebagai berikut:

Rumus: $\text{Capaian Relisasi Indikator/Realisasi Anggaran} \times 100\%$

Dapat dilihat pada tabel 3.30 berikut:

Tabel 3.29 Efektivitas Penggunaan Sumber Daya		
C.R Indikator	R. Anggaran	Efektivitas
100%	99%	101,01%

Sumber: Diskominfo Kabupaten Solok 2023

Pada tabel 3.30 dapat dilihat efektivitas penggunaan sumber daya adalah sebesar 101,01% itu berarti anggaran yang ada sudah dimanfaatkan dengan maksimal dalam pencapaian target yang ditentukan.

f. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Tabel 3.30 Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

No	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran tahun 2023 (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi
1	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	90.919.940	89.705.823	99%

Sumber: Laporan Fisik dan Keuangan Diskominfo Kab. Solok Tahun 2023

g. Rencana Tindak Lanjut Perbaikan

Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan nilai indeks KAMI adalah membuat kebijakan atau regulasi terkait keamanan informasi baik berupa SOP maupun peraturan Bupati.

Sasaran 5. Meningkatnya Tatakelola Organisasi

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.31 Nilai Akuntabilitas Kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	80	70,80	88,5%

Sumber: Diskominfo kab. Solok Tahun 2023

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai akuntabilitas kinerja memiliki target 80% dan terealisasi sebesar 70,80% sehingga persentase capaian menjadi 88,5%. Komponen-komponen yang dipergunakan untuk penentuan akuntabilitas instansi yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori sebagai berikut:

Tabel 3.32 Kategori Nilai Akuntabilitas Kinerja

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan
3	BB	>70-80	Sangat Baik
4	B	>60-70	Baik
5	CC	>50-60	Cukup(Memadai)
6	C	>30-50	Kurang
7	D	0-30	Sangat Kurang

Sumber: Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Diskominfo 2022

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai 0 s.d 100, Dinas Komunikasi dan informatika kabupaten solok memperoleh kategori BB (Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel)

b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja

Realisasi kinerja serta capaian kinerja dalam peningkatan laporan kinerja instansi pemerintah dapat dilihat pada tabel 3.33 di bawah sebagai berikut:

Tabel 3.33 Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja

NO	Indikator Kinerja	Kondisi Awal		Target		Realisasi		% Capaian		Target akhir RPJMD/Renstra	% Capaian akhir RPJMD/Renstra
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	79	80	79	80	81,44	70,80	101,8%	88,5%	84	84,28%

Sumber: Diskominfo Kabupaten Solok 2023

Dalam tabel 3.33 dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 target Nilai Akuntabilitas Kinerja Diskominfo adalah 79 dan terealisasi 81,44% capaian 101,8%. Pada tahun 2023 target 80% dan terealisasi sebesar 70,80 capaian 84,28%. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 84% persentase capaian akhir Renstra terhadap tahun ini yaitu 84,28%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional dan Provinsi

Akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.34 Komponen yang dinilai Nilai Akuntabilitas Kinerja

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Hasil Evaluasi
1	Perencanaan Kinerja	30	21,00
2	Pengukuran Kinerja	30	21,00
3	Pelaporan Kinerja	15	10,80
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,00
	Jumlah	100%	70,80

Sumber: Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Diskominfo 2022

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai 0 s.d 100, Dinas Komunikasi dan informatika kabupaten solok memperoleh kategori BB (Baik) dengan nilai 70,80.

d. Analisa penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta solusi yang dilakukan

1. Penyebab Keberhasilan/Peningkatan Kinerja

- a. Dokumen rencana kinerja tahunan telah memenuhi kriteria penyusunan dokumen perencanaan.
- b. Tercapainya pemenuhan dokumen Renstra, Kualitas Renstra dan implementasi renstra.
- c. Informasi kinerja telah dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan dan perbaikan kinerja

2. Penyebab kegagalan/penurunan kinerja

- a. Rencana kinerja tahunan belum dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran
- b. Pengukuran kinerja belum menggunakan teknologi sistem informasi
- c. Hasil pengukuran capaian kinerja seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dan punishment
- d. Menindaklanjuti hasil evaluasi rencana aksi setiap bulannya.

e. Analisa Atas Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya

1. Efisiensi

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Untuk efisiensi penggunaan sumber daya dapat diperoleh persentase efisiensinya mencapai 88,5% upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa, pemberi masukan dan Kerjasama.

2. Efektivitas

Efektivitas penggunaan sumber daya dapat diperoleh persentase sebagai berikut:

Rumus: $\text{Capaian Relisasi Indikator/Realisasi Anggaran} \times 100\%$

Dapat dilihat pada tabel 3.36 berikut:

Tabel 3.35 Efektivitas Penggunaan Sumber Daya

C.R Indikator	R. Anggaran	Efektivitas
88,5%	98%	90,30%

Sumber: Diskominfo kab. Solok Tahun 2023

Pada tabel 3.36 dapat dilihat efektivitas penggunaan sumber daya adalah sebesar 96,19% itu berarti anggaran yang ada sudah dimanfaatkan dengan maksimal dalam pencapaian target yang ditentukan.

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan target kinerja

Tabel 3.36 program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan target kinerja

No	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran tahun 2023 (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi
	Program penunjang pemerintahan daerah Kabupaten/Kota		143.958.622	140.788.996	98%
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	53.438.000	52.657.000	99%
	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dann Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	90.520.622	88.131.996	97%

Sumber: Laporan Fisik dan Keuangan Diskominfo kab. Solok Tahun 2023

g. Rencana Tindak Lanjut Perbaikan

Upaya yang dilakukan dalam perbaikan pada masa yang akan datang sebagai berikut:

1. Rencana biaya tahunan agar dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran
2. Pengukuran kinerja agar dikembangkan menggunakan teknologi informasi
3. Hasil pengukuran capaian kinerja seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*
4. Menindaklanjuti hasil evaluasi rencana aksi dalam bentuk langkah-langkah nyata

2. Nilai Kepuasan Aparatur

Nilai indeks kepuasan aparatur memberi gambaran tentang kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai penyelenggara pelayanan dengan penerima pelayanan publik. Hasil survey nilai kepuasan aparatur terhadap pelayanan publik dengan menggunakan 10 unsur sebagai dasar pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.37 Pertanyaan Untuk mengukur Nilai Indeks Kepuasan Aparatur di dokumen Renstra

N O	PERNYATAAN	JAWABAN			
		TIDAK SETUJU	RAGU RAGU	SETUJU	SANGAT SETUJU
1	Bidang Sekretariat dapat menyediakan ATK yang diperlukan untuk menunjang kelancaran administrasi dan kegiatan bidang				
2	Bidang Sekretariat dapat menyediakan barang cetakan sebagai penunjang kegiatan bidang				
3	Sarana dan prasarana untuk penunjang kegiatan sudah mencukupi (laptop, kendaraan operasional, dll)				
4	Kebersihan dan kenyamanan kantor sudah baik				
5	Akses internet sebagai penunjang utama kegiatan harian sudah baik				
6	Pelayanan terhadap pengurusan administrasi kepegawaian (naik pangkat, gaji berkala, dll) ASN dapat terpenuhi dengan baik				
7	Pengurusan surat menyurat sudah berjalan dengan baik				
8	Kecepatan proses pelayanan keuangan sangat baik				

N O	PERNYATAAN	JAWABAN			
		TIDAK SETUJU	RAGU RAGU	SETUJU	SANGAT SETUJU
9	Ketepatan waktu pemberitahuan informasi baik (urusan umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan)				
10	Fasilitas ruang rapat sudah baik				

Sumber: Diskominfo kab. Solok Tahun 2023

Dengan interval sebagai berikut:

Tabel 3.38 Nilai kinerja unit pelayanan

Nilai interval IKM	Nilai interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1,00 - 1,75	25,00 - 43,75	D	Tidak Baik
1,76 - 2,50	43,76 - 62,50	C	Kurang Baik
2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	B	Baik
3,26 - 4,00	81,26 - 100,00	A	Sangat Baik

Sumber: Diskominfo kab. Solok Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat diperoleh nilai indeks kepuasan aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu 3,32 yang menggambarkan kinerja atas pelayanan publik dengan katagori untuk Mutu Pelayanan “ A “ dengan Kinerja Unit Pelayanan adalah SANGAT BAIK.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.39. Nilai Kepuasan Aparatur

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1	Nilai Kepuasan Aparatur	2,7	3,32	122,96%

Sumber: Survei indeks kepuasan aparatur Diskominfo Kabupaten solok Tahun 2023

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai kepuasan aparatur memiliki target 2,7 dan terealisasi sebesar 3,32 sehingga persentase capaian menjadi 122,96%.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja

Tabel 3.40 Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja

NO	Indikator Kinerja	Kondisi Awal		Target		Realisasi		% Capaian		Target akhir RPJMD/Renstra	% Capaian akhir RPJMD/Renstra
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		
1.	Nilai Kepuasan Aparatur	2,51	2,7	2,51	2,7	3,29	3,32	131,07 %	122,96 %	3,35	99,10%

Sumber: Diskominfo kab. Solok Tahun 2023

Dalam tabel diatas dapat dilihat bahwa target nilai kepuasan aparatur adalah 2,7 dan terealisasi sebesar 3,32 sehingga capaian kinerja menjadi 122,96%. Jika dibandingkan dengan target akhir renstra yaitu 3,35 maka capaian akhir renstra terhadap tahun ini yaitu sebesar 99,10%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota

Perbandingan realisasi kinerja dalam nilai kepuasan aparatur dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.41 Perbandingan Nasional, Provinsi dan Kab. Solok

No	Indikator Kinerja	Nasional	Provinsi	Kabupaten Solok
1.	Nilai Kepuasan Aparatur	-	-	3,32

Sumber: Diskominfo kab. Solok Tahun 2023

d. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

Melalui data dan informasi tentang tingkat kepuasan aparatur dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan harapan penerima pelayanan publik. Contohnya apabila ada kebutuhan baik berupa ATK,

cetakan maupun surat menyurat dari bidang maupun sekretariat dapat terpenuhi dengan baik.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dengan anggaran yang tersedia, bidang sekretariat memanfaatkan anggaran sebaiknya untuk pemenuhan kebutuhan agar proses layanan dan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika berjalan dengan lancar.

Analisa Atas Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya

1. Efisiensi

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Untuk efisiensi penggunaan sumber daya dapat diperoleh persentase efisiensinya mencapai 131,07% upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa, pemberi masukan dan Kerjasama.

2. Efektivitas

Efektivitas penggunaan sumber daya dapat diperoleh persentase sebagai berikut:

Rumus: $\text{Capaian Relisasi Indikator/Realisasi Anggaran} \times 100\%$

Dapat dilihat pada tabel 3.42 berikut:

Tabel 3.42 Efektivitas Penggunaan Sumber Daya

C.R Indikator	R. Anggaran	Efektivitas
122,96%	93%	132,2%

Sumber: Diskominfo kab. Solok Tahun 2023

Pada tabel 3.42 dapat dilihat efektivitas penggunaan sumber daya adalah sebesar 132,2% itu berarti anggaran yang ada sudah dimanfaatkan dengan maksimal dalam pencapaian target yang ditentukan.

f. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Tabel 3.43 Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

No	Program/Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran tahun 2023 (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi
	Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		3.532.204.322	3.281.292.072	93%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.605.903.777	2.542.760.172	98%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.049.000	3.946.300	97%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4.284.000	3.895.000	91%

No	Program/Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran tahun 2023 (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.660.330	3.606.300	99%
	Administrasi umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	960.000	960.000	100%
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.439.630	15.623.300	95%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.153.300	9.303.000	92%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	454.669.000	312.364.563	69%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	494.500	99%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74.191.674	62.972.092	85%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	119.930.595	118.337.688	99%

No	Program/Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran tahun 2023 (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	197.749.016	173.650.508	88%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	39.714.000	33.378.649	84%

Sumber: Laporan Fisik dan Keuangan Diskominfo 2023

g. Rencana Tindak Lanjut Perbaikan

Upaya yang dilakukan dalam perbaikan pada masa yang akan datang berikut:

1. Menyediakan ATK untuk menunjang kelancaran administrasi
2. Menyediakan barang cetakan untuk penunjang kegiatan
3. Sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan operasional
4. Kebersihan dan kenyamanan kantor
5. Akses internet yang baik
6. Pelayanan terhadap pengurusan administrasi terpenuhi dengan baik
7. Pengurusan surat menyurat berjalan dengan baik
8. Kecepatan proses pelayanan keuangan sangat baik
9. Ketepatan pemberian informasi yang baik
10. Fasilitas ruang rapat yang memadai

3.2 Realisasi Anggaran

a) Pendapatan

Program/kegiatan yang memberikan kontribusi terhadap pemerintah Kabupaten Solok dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Target dan realisasi pendapatan pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.44 berikut :

Tabel 3.44 Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2023

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasai (Rp)	Persentase Capaian (%)
	Rtribusi Pengendalian Menara Telkomsel	400.088.109	409.350.793	102,32%
	Total	400.088.109	409.350.793	102,32%

Sumber: Diskominfo kab. Solok Tahun 2023

Pada tahun anggaran 2023, target pendapatan daerah yang menjadi tanggung jawab dari Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebesar Rp.400.088.109,- yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Sampai bulan Desember tahun 2022 pendapatan mampu direalisasikan adalah sebesar Rp. 409.350.793,- dengan persentase 102,32%.

b) Belanja

Pada tahun 2023 alokasi anggaran untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok adalah sebesar Rp. **9.014.979.411,-** yang terdiri dari belanja operasi dan belanja modal. Belanja tersebut digunakan untuk membiayai program-program dan kegiatan-kegiatan di bidang Komunikasi dan Informatika untuk mencapai visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

VISI dan MISI Dinas Komunikasi dan Informatika:

Visi	Mambangkik Batang Tarandam, Menjadikan Kabupaten Solok terbaik di Sumatera Barat
Misi	Misi 4 : Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Bersih

Sumber: Renstra 2021-2026

BAB IV

PENUTUP

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Solok (Diskominfo Kabupaten Solok) pada Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun ketiga dari Rencana Strategis Diskominfo Kabupaten Solok Tahun 2021-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan dari renstra 5 tahun sebelumnya. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Diskominfo Kabupaten Solok tahun 2021 dapat disimpulkan terdapat 9 (sembilan) indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2023, sembilan indikator telah memenuhi target yang ditetapkan.

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan kinerja yang dihadapi dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Memenuhi sarana dan prasarana, infrastruktur, dan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas secara bertahap yang dapat mendukung kinerja Dinas Kominfo.
2. Menitikberatkan rencana aksi dalam penerapan tolak ukur indikator kinerja.
3. Mensinergikan setiap aplikasi melalui Integrasi dalam peningkatan layanan kepada masyarakat, dan mewujudkan efisiensi dan efektivitas.
4. Mengedukasi seluruh OPD/SKPD dan *stakeholder* terkait dalam mendukung Indikator Kinerja Umum (IKU) Dinas Kominfo Kabupaten Solok.
5. Dalam penyusunan anggaran, perlu memprioritaskan unsur kebutuhan, bukan unsur keinginan.